

PENERAPAN DIGITALISASI PEMBAYARAN QRIS PADA UMKM DI DESA KERTARAHARJA

Darmansyah Hegi Pranoto¹, Hesti Widiastuti²

Program Studi Manajemen¹, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar²

mn21.darmansyahpranoto@mhs.ubpkarawang.ac.id ¹, hesti.widiastuti@ubpkarawang.ac.id ²

Abstrak

Mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang melaksanakan KKN mulai dari tanggal 15 Juli-15 Agustus 2024 yang berlokasi di Desa Kertaraharja, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang. KKN Universitas Buana Perjuangan Tahun 2024 bertemakan “Membangun Desa Mandiri dan Berkelanjutan”. KKN ini termasuk KKN reguler dengan mewajibkan setiap mahasiswa untuk melaksanakan 1 (satu) program kerja individu yang berkaitan dengan 1 (satu) program SDGs Desa sesuai bidang studi. Desa Kertaraharja memiliki banyak UMKM diberbagai bidang seperti makanan, minuman dan kerajinan anyaman. Mahasiswa ingin membantu pelaku UMKM agar usaha mereka menjadi lebih berkembang dan maju sehingga meningkatkan perekonomian mereka. Pelaksanaan program kerja individu penerapan pembayaran QRIS pada UMKM dilakukan menggunakan metode implementatif dengan pelaksanaan pada tanggal 01-02 Agustus 2024. Mengetahui UMKM di desa Kertaraharja belum banyak yang menerapkan digitalisasi pembayaran QRIS, mahasiswa merasa tergerak untuk membantu UMKM dalam menerapkannya. Mahasiswa membantu menerapkan pembayaran QRIS dengan menggunakan GoPay Merchant pada UMKM Kunyit Instan KS Campernik dan UMKM Cake Lumer Momcha. Hasilnya Ibu Hayati Nupus dan Ibu Nurhalimah sebagai pelaku UMKM Kunyit KS Campernik dan UMKM Cake Lumer Momcha sangat senang karena kini usahanya menyediakan pembayaran secara cashless. Penerapan pembayaran QRIS sangat positif dalam mencapai pertumbuhan ekonomi desa merata (SDGs ke-8). Mahasiswa berharap semua pelaku UMKM dapat menerapkan pembayaran QRIS.

Kata Kunci: Digitalisasi Pembayaran; Pembayaran Non-Tunai; QRIS; UMKM

Abstract

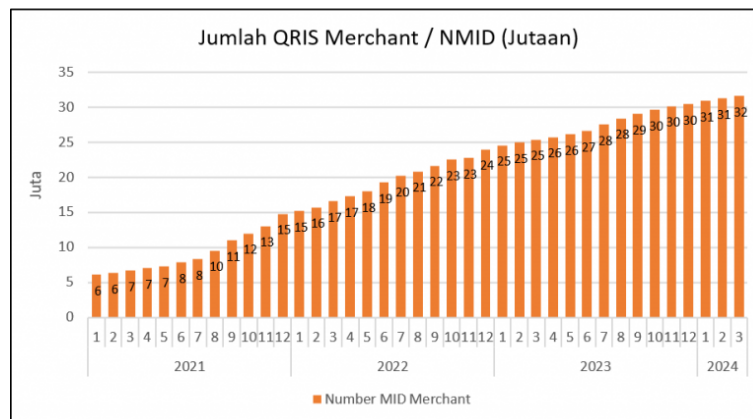
Buana Perjuangan University Karawang Students carry out KKN starting from July 15-August 15, 2024 which is located in Kertaraharja Village, Pedes District, Karawang Regency. KKN Buana Perjuangan University in 2024 has the theme “Building Independent and Sustainable Villages”. This KKN includes regular KKN by requiring each student to carry out 1 (one) individual work program related to 1 (one) Village SDGs program according to the field of study. Kertaraharja Village has many MSMEs in various fields such as food, drinks and wickerwork. Students want to help MSME players so that their businesses become more developed and advanced so as to improve their economy. The implementation of the individual work program for the application of QRIS payments to MSMEs was carried out using an implementative method with implementation on 01-02 August 2024. Knowing that not many MSMEs in Kertaraharja village have implemented QRIS payment digitization, students feel moved to help MSMEs in implementing it. Students help implement QRIS payments using GoPay Merchant at KS Campernik Instant Turmeric MSMEs and Momcha's Cake Lumer MSMEs. As a result, Mrs. Hayati Nupus and Mrs. Nurhalimah as the perpetrators of the Kunyit KS Campernik UMKM and Cake Lumer Momcha UMKM are very happy because now their business provides cashless payments. The application of QRIS payments is very positive in achieving equitable village economic growth (8th SDGs). Students hope that all MSME players

Keywords: *Cashless Payment; MSMEs; Payment Digitalization; QRIS*

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu desa di Kabupaten Karawang dan Kecamatan Pedes, desa Kertaraharja memiliki luas 765 km² berdasarkan data Pemda Kab. Karawang (2022). Desa Kertaraharja merupakan desa berkembang dengan pertumbuhan Indeks Desa Membangun (IDM) yang cukup baik. Kepala Desa Kertaraharja Bapak H. Yahya mengatakan pada saat rapat mingguan Rabu, 24 Juli 2024 (minggon kedua selama KKN UBP Karawang 2024) “Desa ini diproyeksikan akan menjadi desa maju di tahun 2025”. Hal ini menunjukkan bahwa keseriusan pemerintah desa ketaraharja dalam memanfaatkan dana desa dengan melakukan pembangunan desa demi tercapainya desa maju

hingga desa mandiri. Pembangunan pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seperti bantuan sarana dan prasarana harus menjadi prioritas utama pembangunan desa, karena UMKM menopang sebagian perekonomian Indonesia. Perkembangan industri 4.0 pada saat ini memungkinkan setiap lini kehidupan dan setiap sektor usaha beralih dari sistem tradisional atau manual menjadi sistem digitalisasi. Digitalisasi menasar pada salah satu sektor usaha yaitu sektor UMKM. UMKM di Indonesia saat ini dalam masa peralihan menjadi sistem digital, termasuk salah satunya UMKM di desa kertaraharja. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Pasal 1 Ayat 5 menyatakan bahwa “Standar Nasional QR Code Pembayaran (Quick Response Code Indonesian Standard) yang selanjutnya disebut QRIS adalah Standar QR Code Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia. Hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi digitalisasi di Indonesia yang pesat sehingga memudahkan setiap transaksi yang dilakukan. “Penerapan QRIS dapat dikatakan sebagai langkah awal transformasi digital di sistem pembayaran Indonesia dalam membantu percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan digital” (Juhro, 2020:219). Menurut Srikaningsih (2020:4) “Dengan adanya QRIS ini diharapkan transaksi pembayaran lebih efisiensi atau murah, inklusi keuangan di Indonesia lebih cepat, UMKM bisa maju dan pada akhirnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi”. Bagi merchant, QRIS lebih praktis karena hanya diperlukan satu kode QR standar untuk menerima pembayaran dari berbagai sumber dana dan/atau alat pembayaran yang berbeda (Sibarani et al., 2023:21). Penerapan QRIS pada sektor UMKM dapat memberikan manfaat yang baik kepada mereka guna memudahkan transaksi dalam sistem pembayaran cashless serta dengan sistem keamanan yang lebih protektif. Pertama kali penerapan QRIS di Indonesia terhitung sejak 1 Januari 2020. Bukan tanpa alasan bahwa penerapan QRIS sebagai upaya akselerasi Bank Indonesia bersama dengan pemerintah dalam mengikuti pesatnya perkembangan teknologi digitalisasi pembayaran. Bank Indonesia meyakini bahwa penggunaan QRIS dapat meningkatkan efisiensi serta inklusi keuangan.



Gambar 1 Jumlah QRIS Merchant di Indonesia Sumber: Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, 2024

Pengguna QRIS Merchant selalu mengalami peningkatan setiap tahun bahkan di setiap bulannya. Tercatat ID Merchant QRIS yang sudah terdaftar sebanyak 32 juta pengguna pada bulan Maret 2024. UMKM yang menjadi pengguna QRIS Merchant terbanyak guna memberikan kemudahan transaksi bagi setiap pelanggan, meningkatkan efisiensi serta sistem keamanan yang lebih baik, itulah mengapa UMKM banyak yang mengaplikasikan digitalisasi pembayaran QRIS. Mahasiswa KKN UBP Karawang seringkali melihat UMKM di desa kertaraharja yang melakukan transaksi dengan pembeli biasanya mereka membayar produk yang dibeli secara tunai dan belum mengaplikasikan pembayaran secara cashless seperti digitalisasi pembayaran QRIS (Quick Respons Code Indonesian Standard). Oleh karena itu, kami membantu para UMKM untuk mengaplikasikan penggunaan QRIS. Pelaksanaan program kerja individu ini dilakukan guna termasuk kedalam Sustainable Development Goals (SDGs desa) ke-8 (delapan) “Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata”. Menurut Peraturan Menteri Nomor 21 tahun (2020) Pasal 1 Ayat 14 menjelaskan “SDGs desa adalah upaya terpadu pembangunan desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan”. SDGs desa berisi 18 program pembangunan desa sebagai pedoman pembangunan bagi setiap desa. Pemanfaatan dana desa ditujukan guna menjalankan program-program pembangunan desa yang merata. Menurut Atmaja & Paulus (2022:275) “Teknologi digital telah mendisrupsi fungsi- fungsi konvensional, memengaruhi sendi-sendi perekonomian serta menuntut perubahan dan adaptasi tanpa terkecuali pada sektor sistem pembayaran”. Digitalisasi pembayaran merupakan percepatan suatu sistem digitalisasi keuangan yang memungkinkan peralihan sistem pembayaran konvensional menjadi digital atau komputerisasi. Era revolusi industri

4.0 ini memungkinkan setiap sektor perekonomian untuk mengaplikasikan sistem digitalisasi termasuk digitalisasi pembayaran. Tren digitalisasi pembayaran cashless atau pembayaran non tunai yang meningkat di sektor perekonomian khususnya para pelaku UMKM membuat mereka “terpaksa” mengikuti perkembangan tren digital dengan melakukan peralihan dari sistem pembayaran konvensional (tunai) menjadi non tunai. Pelaku UMKM kini banyak beralih dengan penggunaan teknologi digital pembayaran salah satunya ialah penggunaan QRIS. Menurut Sihaloho et al., (2020:291) QRIS (QR Code Indonesia Standard) adalah sistem pembayaran yang berbasis shared delivery channel yang digunakan untuk menstandarisasi transaksi pembayaran yang menggunakan QR Code. Pertumbuhan ekonomi desa dapat dicapai apabila pembangunan desa tepat sasaran, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan desa guna mendukung aktivitas perekonomian dan meningkatkan sumber daya manusia bagi masyarakat desa. Selain itu perlu adanya pemberdayaan UMKM melalui program pelatihan, digitalisasi pembayaran dan bantuan permodalan. Penelitian Rimawan & Aryani (2019:294) menyatakan bahwa penggunaan alokasi dana desa secara efektif berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi desa. Hal itu menunjukkan bahwa dengan pembangunan infrastruktur, akses ke pendidikan dan kesehatan serta pemberdayaan UMKM mampu memicu pertumbuhan ekonomi desa. Pengalokasian dana desa tidak dapat serta merta dalam penggunaannya, perlu adanya penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa atau biasa disebut dengan RPJM Desa. Menurut Bawono & Setyadi (2019:49) Penyusunan RPJM Desa dilakukan dengan mengikutsertakan semua unsur masyarakat desa. Aspirasi masyarakat sangat diperlukan guna efektifitas alokasi dana desa demi pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan. Selanjutnya RPJM Desa dikaji secara lebih mendalam oleh tim penyusun RPJM Desa dan melaporkan hasil kajian pada musyawarah desa sebagai bahan pertimbangan pembangunan desa. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah kegiatan usaha perorangan dan bukan suatu badan usaha dengan dikelola oleh satu orang atau lebih. UMKM ialah sektor perekonomian suatu negara yang sangat potensial dalam menopang ekonomi suatu negara. Sebagai contoh ketika Indonesia dilanda pandemi COVID-19 banyak sekali sektor industri yang mengalami kebangkrutan karena adanya aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Indonesia (PPKM) akibatnya sektor industri tidak mampu untuk memenuhi target produksi dan menurunnya permintaan terhadap barang. Namun, kondisi tersebut tidak membuat pelaku UMKM “gulung tikar”. Pada saat pandemi hanya ada dua sektor usaha yang menjadi penopang perekonomian negara yaitu sektor

kesehatan dan UMKM. Hal ini yang harus menjadi perhatian khusus pemerintah dalam memajukan UMKM mulai dari tingkat desa hingga tingkat kota. Adapun menurut Undang-Undang RI nomor 20 Tahun (2008) Pasal 1 Ayat 1-3 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dijelaskan sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan kekayaan dan pendapatannya, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun (2008) Pasal 6 kriteria usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Kriteria usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Berdasarkan uraian diatas penulis membantu UMKM di desa kertaraharja untuk melakukan transaksi dengan sistem pembayaran digital QRIS dengan judul “Penerapan Digitalisasi Pembayaran QRIS pada UMKM di Desa Kertaraharja”.

METODE

Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi mahasiswa terhadap pembangunan desa guna menumbuhkan perekonomian masyarakat Desa Kertaraharja, Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang. Kami menemukan dua UMKM yang belum menerapkan pembayaran QRIS pada sistem transaksinya. Kedua UMKM tersebut ialah UMKM Kunyit Instant KS Campernik dan UMKM Cake Lumer Momcha. Pelaksanaan penerapan QRIS dilakukan selama 2 hari, hari pertama pelaksanaan Kamis, 01 Agustus 2024 dengan melakukan pendaftaran akun kedua UMKM pada aplikasi GoPay Merchant. Hari kedua Jum’at, 02 Agustus 2024, UMKM sudah mendapatkan QR Code dan mencetaknya dengan akrilik. Pelaksanaan ini dilakukan dengan metode deskriptif implementatif pada UMKM Kunyit Instant KS Campernik dan UMKM Cake Lumer Momcha. Selain itu, pelaksanaan ini sebagai pemenuhan kewajiban mahasiswa KKN reguler UBP Karawang yaitu melaksanakan 1 (satu) program kerja individu. Penerapan Digitalisasi pembayaran QRIS pada UMKM di Desa Kertaraharja termasuk kedalam Sustainable Development Goals (SDGs) Desa ke-8 yaitu “Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata”. Kami berharap penerapan QRIS pada UMKM dapat menjadi lebih efisien, keamanan yang lebih baik dan mempermudah pembayaran secara cashless dengan tujuan dapat menumbuhkan perekonomian desa melalui pemberdayaan UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penerapan QRIS ditujukan kepada UMKM di Desa Kertaraharja, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang termasuk kedalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat. Mengetahui dan melihat potensi UMKM di desa kertaraharja, mahasiswa memiliki ketertarikan

dan tidak hanya tinggal diam dengan ikut berpartisipasi untuk membantu UMKM dalam meningkatkan perekonomian mereka. Diantara UMKM yang terdapat di Desa Kertaraharja, mahasiswa tertarik kepada UMKM Kunyit Instant KS Campernik dan UMKM Cake Lumer Momcha. Keduanya memiliki usaha yang bergerak pada bidang makanan dan minuman. UMKM Kunyit Instant KS Campernik ialah usaha yang bergerak pada bidang minuman tradisional milik Ibu Hayati Nupus dan telah berdiri sejak tahun 2016. Usaha ini merupakan suatu inovasi produk minuman tradisional kunyit bubuk dan menjadi salah satu produk unggulan dari desa kertaraharja. Berbagi ulasan positif dari pelanggan dan masyarakat menjadikan produk ini semakin dikenal oleh masyarakat desa. Alhasil produk ini termasuk kedalam produk unggulan dan diberdayakan oleh BUMDES (Badan Usaha Milik Desa). Namun salah satu yang menjadi kekurangan usaha ini belum mengaplikasikan ataupun menerapkan pembayaran cashless. Oleh karena itu mahasiswa membantu UMKM ini dalam menerapkan pembayaran non tunai dengan mengaplikasikan QRIS.



Gambar 2 Penerapan QRIS pada UMKM Kunyit instan KS Campernik Sumber: Penulis, 2024

UMKM selanjutnya ialah UMKM Cake Lumer Momcha, usaha ini didirikan Ibu Nurhalimah pada tahun 2018. Seperti nama usahanya yaitu Cake dengan berbagai varian rasa seperti rasa coklat, strawberi, dan pandan ditambah dengan topping seres dan keju diatasnya.



Gambar 3 Penerapan QRIS pada UMKM Cake Lumer Momcha Sumber: Penulis, 2024

GoPay Merchant dipilih sebagai merchant pembayaran QRIS bukan tanpa alasan yang kuat, Mahasiswa memanfaatkan fitur utama ataupun kelebihan yang tidak ditemukan dari merchant lain seperti pembayaran QRIS All Payment.



Gambar 4 Logo GoPay Merchant Sumber: GoPay Merchant, 2024

Pelaksanaan penerapan digitalisasi pembayaran ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi UMKM sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan sistem keamanan yang lebih baik dibandingkan dengan pembayaran secara tunai karena beberapa risiko yang bisa saja terjadi seperti maraknya pemalsuan uang kertas dll. Selain itu, mahasiswa berharap dengan penerapan QRIS pada UMKM Kunyit Instan KS Campernik dan UMKM Cake Lumer Momcha dapat menumbuhkan perekonomian khususnya masyarakat desa kertaraharja. Program kerja Individu ini ialah sebagai salah satu program SDGs Desa ke-8 yaitu “Pertumbuhan Ekonomi Desa merata.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

UMKM di desa kertaraharja belum banyak yang beralih dari sistem pembayaran tunai, kebanyakan dari mereka sudah mengetahui pembayaran QRIS tetapi belum menerapkannya. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi pemerintah desa, masyarakat dan mahasiswa KKN selanjutnya di desa kertaraharja agar memberikan edukasi dan membantu pemberdayaan UMKM dalam peralihan sistem pembayaran menjadi pembayaran QRIS. Padahal jika kita ketahui pembayaran QRIS sangatlah mudah diaplikasikan untuk setiap kalangan. UMKM hanya perlu untuk mendaftarkannya pada GoPay Merchant agar mendapatkan pembayaran QRIS All Payment. Pembayaran QRIS sangat mahasiswa rekomendasikan pada UMKM desa kertaraharja, guna memberikan kemudahan, kecepatan, keamanan dan mengurangi risiko terkena uang palsu. Oleh karena itu, mahasiswa berharap penerapan digitalisasi pembayaran QRIS ini dapat diterapkan oleh semua UMKM yang terdapat di desa kertaraharja, dengan begitu mahasiswa meyakini perekonomian desa akan tumbuh dengan merata sesuai dengan program SDGs Desa ke-8 yaitu “Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata”.

DAFTAR PUSTAKA

- (Pemda Kab. Karawang). (2022). Luas Desa di Kecamatan Pedes.
- (Permen). (2020). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (UU RI Nomor 20). (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. Atmaja, Y. S., & Paulus, D. H. (2022). Partisipasi Bank Indonesia Dalam Pengaturan Digitalisasi Sistem Pembayaran Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(3), 271–286. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.271-286>
- Bawono, I. R., & Setyadi, E. (2019). Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa (Junaidi & C. Kus Untari (eds.)). Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Juhro, S. M. (2020). Pengantar Kebanksentralan: Teori dan Kebijakan (Monalisa & Hidayati (eds.); 1st ed.). PT. RajaGrafindo Persada.

- Rimawan, M., & Aryani, F. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembanguna Manusia Serta Kemiskinan di Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(3), 287–295.
- Sibarani, B. E., Sugangga, R., Patria, R., Rahman, I., Hidayat, M. S., Wahyuliza, S., Wijaya, L., Azmi, R., & Putra, A. S. B. (2023). *Ekonomi dan Bisnis Digital* (D. W. Mulyasari (ed.); 1st ed.). Pradina Pustaka.
- Sihaloho, J. E., Ramadani, A., & Rahmayanti, S. (2020). Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan. *Jurnal Managemen Bisnis*, 17(2), 287–297. <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/magister-manajemen/>
- Sriekaningsih, A. (2020). *QRIS dan Era Baru Transaksi Pembayaran 4.0* (D. H (ed.); 1st ed.). Penerbit Andi.